



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 5161-5171

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Degradasi Demokrasi Lokal: Studi Kasus Politik Dinasti Kota Batu

Alfan Huda^{1✉}, Dzulkarnain Jamil²

Pascasarjana Ilmu Sosial Universitas Brawijaya

Email: alfanhuda085@student.ub.ac.id^{1✉}

Abstrak

Politik dinasti menciptakan ketidaksetaraan dalam akses dan distribusi sumber daya. Risiko ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat meningkat karena memanfaatkan keuntungan untuk pribadi dan keluarga. Kesempatan menjadi timpang terhadap warga negara. Hal ini dapat menghambat perkembangan sistem politik yang demokratis dan adil. Kajian Degradasi Demokrasi Lokal: Studi Kasus Politik Dinasti Kota Batu merupakan kajian yang penting untuk diketengahkan. Pengarusutamaan kajian melihat peran aktor dalam membangun dinasti kekuasaan. Berperan penting bagi pengetahuan di bidang kajian politik pemerintahan, dan Ilmu sosial untuk melihat dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat praktik politik dinasti bagi demokrasi lokal. Menegaskan Perbedaan dari penelitian sebelumnya. Yang luput dalam melihat bagaimana aktor bermain dalam mengamankan kekuasaan. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian literatur review yang bersandar pada data Sekunder dikumpulkan secara bertahap melalui beberapa platform seperti berita, artikel, Scindirect, Google Scholar, dll. Dengan demikian, penelitian ini menjadi dasar bagi masyarakat, akademisi, politisi, dan ketua partai untuk mengkaji ulang dalam membina kader serta memberikan dukungan kepada calon kepada daerah.

Kata Kunci: *Politik Dinasti, Demokrasi, Kekuasaan*

Abstract

Dynastic politics creates inequality in access to and distribution of resources. The risk of social and economic inequality can increase as individuals exploit advantages for personal and family gain. Opportunities become skewed for citizens, hindering the development of a democratic and fair political system. The study of Local Democracy Degradation: A Case Study of Dynastic Politics in Batu City is crucial to highlight. The study emphasizes the mainstreaming of the roles of actors in building dynastic power. It plays a significant role in enhancing knowledge in the field of political governance studies and social sciences to understand the damage caused by dynastic political practices to local democracy. This research asserts differences from previous studies by addressing how actors engage in securing power. The research utilizes a literature review method grounded in secondary data collected gradually through various platforms such as news, articles, Scindirect, Google Scholar, etc. Consequently, this study serves as a foundation for the community, academics, politicians, and party leaders to reassess in nurturing cadres and providing support to candidates in the region.

Keywords: *Dynastic Politics, Democracy, Power*

PENDAHULUAN

Politik dinasti telah mereduksi demokrasi. Kehadiran politik dinasti menunjukkan tingkat kesuburan oligarki. Proses kandidasi pencalonan akan cenderung berdasarkan keinginan elit politik. Perputaran sirkulasi kekuasaan akan terhambat dan terpusat pada individu/kelompok tertentu. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Yoes C. Kenawas menunjukkan politik dinasti yang ada di Indonesia mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Jumlah kenaikan tersebut tiga kali lipat, yaitu sebesar 300%. Dari 158 calon yang berpartisipasi di pilkada sebanyak 67 berpotensi memenangi pilkada. Yoes C. Kenawas selaku peneliti Amerika Serikat menyebutkan kenaikan jumlah politik dinasti tentu sangat mengkhawatirkan bagi demokrasi Indonesia. Hal ini menunjukkan buruknya jalur penjarangan untuk jadi pemimpin di Indonesia. Proses kandidasi yang tidak transparan dan terbatas untuk orang-orang tertentu yang memiliki pertalian darah dengan elite. Berpotensi terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan. Begitupun dengan Marcus Mietzner, bahwa kecenderungan politik dinasti yang terjadi di Indonesia cukup menguat dalam politik kontemporer. Praktik ini menjadi tidak sehat bagi demokrasi, antara lain karena kontrol terhadap pemerintah menjadi lemah.

Sejauh ini studi tentang Politik Dinasti cenderung melihat tiga isu utama. Pertama, relasi politik dinasti dan demokrasi. Kedua, rekrutmen politik dan pembentukan politik dinasti. Ketiga, Dampak/implikasi yuridis politik dinasti. Pertama, jurnal yang ditulis oleh Agus Dedi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan maraknya praktik politik dinasti

menandakan bahwa pendidikan politik di tanah air tidak berjalan dengan baik. Politik dinasti menjadi sebuah masalah dalam membangun demokrasi. Idealnya, setiap individu di dalam negara yang demokratis seharusnya memiliki kesempatan yang sama dan berkeadilan untuk menjadi pemimpin. Kedua, oleh Fitriyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana partai politik melaksanakan proses rekrutmen yang turut menyuburkan politik dinasti, partai politik terindikasi masalah dalam melaksanakan fungsi rekrutmen politik dengan menggunakan pertimbangan pragmatis. Ketiga, kajian oleh Anies Prima Dewi dkk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi yuridis politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 telah membuka ruang bagi terciptanya politik dinasti, Undang - undang tersebut bertentangan dengan kehendak rakyat yang tidak menginginkan adanya politik dinasti. Fakta dilapangan menunjukan semenjak lahirnya Undang-undang tersebut telah menyuburkan politik dinasti pada pilkada. Dari ketiga kecenderungan penelitian di atas tampak bahwa, kajian mengenai politik dinasti luput dalam melihat bagaimana cara seorang politisi membangun dan mempertahankan dinasti kekuasaan terhadap keluarga/orang terdekat. Padahal, sudah seharusnya kita memperhatikan figur sentral yang menciptakan politik dinasti, melalui cara itu kita bisa mengetahui akar dari permasalahan yang sedang terjadi.

Tulisan ini bertujuan melengkapi keterbatasan dari studi yang ada, yang luput melihat cara politisi membangun dan mempertahankan kekuasaan dinastinya. Hal ini menjadi penting untuk mengetahui akar masalah dan mencegah terjadinya degradasi demokrasi akibat politik dinasti. Sejalan dengan itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan cara politisi membangun dan mempertahankan dinasti kekuasaannya. Hasil penelitian menunjukkan alasan dibalik terjadinya politik dinasti di Kota Batu yang pertama disebabkan oleh Gurita bisnis Eddy Rumpoko yang berhasil membentuk kuasa politik. Kedekatan dengan pengusaha menjadi kunci bagi dirinya untuk memperluas dan mempertahankan kuasanya. Jawaban atas pertanyaan tersebut memungkinkan diperoleh suatu pengetahuan yang mendalam tentang alasan dibalik terjadinya politik dinasti di Kota Batu, Malang. Pengetahuan ini dapat menjadi perluasan pandangan bagi masyarakat sipil , politisi, mahasiswa, akademisi maupun khalayak umum dalam mengkaji politik dinasti.

Politik dinasti yang terjadi di Kota Batu tidak bisa dilepaskan dari figur Eddy Rumpoko. Sebagai seorang politisi sekaligus pengusaha tentu dengan mudah untuk mempertahankan kekuasaan didalam lingkaran keluarga mereka. Dengan kemampuan finansial, jejaring bisnis, dan kepopuleran yang dimiliki memainkan peran penting dalam

mengokohkan kedudukan keluarga Eddy Rumpoko untuk berkuasa. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menjawab bagaimana Eddy Rumpoko mempertahankan kekuasaan yang dimiliki untuk membangun politik dinasti di Kota Batu?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian literatur review yang bersandar pada data Sekunder dikumpulkan secara bertahap melalui beberapa platform seperti berita, artikel, Scindirect, Google Scholar, dll. Dalam upaya menganalisis dan memecahkan permasalahan yang dirumuskan dalam latar belakang. Karya tulis ini nantinya menghasilkan output analisis deskriptif. Metode literatur review dipilih karena dalam mengumpulkan dan memadukan penelitian sebelumnya melalui cara yang sistematis. Tinjauan literatur merupakan cara terbaik untuk mensintesis temuan penelitian untuk menunjukkan bukti dan mengungkap area di mana diperlukan lebih banyak penelitian, yang merupakan komponen penting untuk menciptakan kerangka kerja teoretis dan membangun model konseptual. Dengan mengintegrasikan temuan dan perspektif dari banyak temuan empiris, tinjauan literatur dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan kekuatan yang tidak dimiliki oleh satu studi pun. Untuk jenis studi literatur yang digunakan peneliti menggunakan studi literatur sistematis. Studi literatur sistematis dapat dipahami sebagai metode dan proses penelitian untuk mengidentifikasi dan menilai secara kritis penelitian yang relevan, serta untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari penelitian tersebut. Tujuan dari studi literatur sistematis untuk mengidentifikasi semua bukti empiris yang sesuai dengan kriteria inklusi yang telah ditentukan sebelumnya untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian tertentu. Dengan menggunakan metode eksplisit dan sistematis saat meninjau artikel dan semua bukti yang tersedia, bias dapat diminimalkan, sehingga memberikan temuan yang andal dari mana kesimpulan dapat ditarik dan keputusan dibuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Memaknai Politik Dinasti

Politik dinasti merupakan pelibatan keluarga untuk mendapatkan jabatan politik di pemerintahan. Suatu tindakan dapat dikatakan politik dinasti apabila suatu keluarga mampu memperluas dan mempertahankan kekuasaannya ketika pendiri dinasti telah berakhir masa jabatannya. Maraknya politik dinasti telah menjadi diskursus kritis publik. Menunjukkan sebagai gejala fenomena kelemahan demokrasi. Kemunculan politik dinasti

ditingkat lokal ditandai dengan adanya pembagian kekuasaan dari pusat ke daerah. Sehingga berimplikasi terhadap kemunculan orang kuat lokal. Hadiz dan Winters melihat politik dinasti merupakan keadaan dari sistem politik yang ditandai dengan hilangnya gerakan berbasis kelas yang membatasi kemunculan politik dinasti. Hal itu tergantikan oleh satu kelompok/klan tertentu yang menghasilkan kekuasaan yang mendominasi. Fenomena tersebut merupakan konsekuensi logis yang harus diterima. Seorang politisi secara natural akan berupaya untuk memperkokoh orang-orang terdekat mereka dalam mempertahankan kekuasaan politiknya melalui celah yang bisa dimanfaatkan, terutama dalam sistem politik yang mendukung iklim tersebut. Politisi akan berusaha membesarkan keluarga mereka jika diberi kesempatan, mengandalkan jaringan keluarga dan membangun dinasti menjadi strategi politik yang efektif di antara strategi alternatif yang tersedia bagi aktor politik lokal demi melanggengkan kuasanya. Berikut gambaran terjadinya politik dinasti yang terjadi di daerah Indonesia.

Tabel 1 Jumlah Politik Dinasti

Nama Jabatan	Jumlah
Calon Bupati	57
Calon Wakil Bupati	30
Calon Wali Kota	20
Calon Wakil Walikota	8
Calon Gubernur	5
Calon Wakil Gubernur	4

Sumber: Republika, 2020.

Politik dinasti telah berimplikasi terhadap meningkatkan pragmatisme politik dengan mendorong keluarga atau kerabat penguasa menjadi pejabat. Hal ini telah menghalangi partisipasi masyarakat karena status sosial atau hak mereka jauh berbeda dengan keluarga dinasti. Dinamika politik yang sedang terjadi semakin menunjukkan akar feodalisme, dan tradisi monarki belum sepenuhnya berubah dan terus menggerogoti makna demokrasi yang sebenarnya. Penguasaan politik yang terfokus pada satu kelompok membuka peluang terjadinya praktik korupsi. Jika akar feodalisme masih tertanam kuat di negeri ini, tampaknya memberantas politik dinasti tidak akan mudah dan menunjukkan sistem demokrasi kita belum mapan. Pada ujungnya kita akan mengalami pesimis berharap ada perubahan besar dari proses politik saat ini, selama sistem feodalisme masih mengakar kuat di negeri kita.

Normalisasi Politik Dinasti

Kehadiran politik dinasti telah berlangsung sejak lama yang menimbulkan kecemasan mengenai timpangnya dalam distribusi kekuatan politik mencerminkan lemahnya perwakilan demokratis dalam politik. Maraknya politik dinasti yang melibatkan perebutan kekuasaan di daerah membuat kita sukar memahami hakikat demokrasi itu sendiri. Suburnya politik dinasti khususnya di daerah, tidak lepas dari peran partai politik dan ketentuan terkait Pilkada Partai politik membuat mekanisme pencalonan dan pencalonan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal Partai politik merupakan penyangga demokrasi dalam bernegara. Peran fungsi partai politik bisa menentukan arah gerak negara. Baik buruk demokrasi, bergantung terhadap cara kerja partai politik. Keberadaannya vital sebagai sarana penyalur kepentingan masyarakat. Sampai saat ini partai politik dalam proses kandidasi mengajukan sesuai dengan keinginan elit politik bukan melalui mekanisme yang terbuka, adil, jujur, berlandaskan kemampuan calon. Menguatnya jaringan politik yang dibangun oleh politik dinasti berdasarkan kedekatan politik kekeluargaan menyebabkan rekrutmen politik menjadi terhambat dan orang-orang yang berada diluar dinasti mengalami kesulitan. Kita bisa melihat bagaimana partai politik turut memainkan peranan penting dalam mengusung calon politik dinasti dalam bagan ini.

Tabel 2 Partai Politik Pengusung Politik Dinasti.

Nama Partai	Persentase
PDIP	12.4%
Golkar	12.9%
Gerindra	9.7%
Nasdem	10.1%
Demokrat	8.5%
PAN	8.1%
PKB	6.0%
PKS	7.1%
PPP	7.1%
Hanura	6.5%
Perindo	3.7%
PSI	1.8%
PBB	2.3%
Berkarya	2.3%
PKPI	1.4%

Sumber: Republika, 2020.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwasanya hampir seluruh partai politik terlibat dalam proses pendudukan politik dinasti. Hal ini tentu menjadi ironi, suatu lembaga yang merupakan pilar demokrasi justru menjadi salah satu sumber dalam mereduksi demokrasi itu sendiri. Seharusnya partai politik menjadi filter dan garda terdepan dalam mengurangi terjadinya praktik politik dinasti. Penulis melihat berdasarkan kajian literature yang telah dilakukan setidaknya ada beberapa alasan mengapa politik dinasti bisa terjadi. Yang pertama adalah bahwa pembangunan dinasti mungkin merupakan strategi pertahanan. Mengingat bahwa kunci keberhasilan politik di daerah Indonesia seringkali terletak pada pencapaian dan distribusi sumber daya patronase, tidak mengherankan jika pemegang jabatan politik akan mencari cara untuk membangun kekuasaan yang juga melindungi diri dari penyelidikan atau penuntutan hukum. Kita bisa melihat hal ini ketika para kepala daerah ketika sudah tidak lagi menjabat kerap kali ditangkap oleh KPK. Memasang anggota keluarga dalam kekuasaan mungkin merupakan salah satu cara untuk menjadi tameng bagi dirinya. Dengan demikian 'membangun dinasti merupakan strategi perlindungan untuk melindungi diri mereka sendiri dan 'orang terdekat mereka dari ancaman hukuman. Jika pemegang kekuasaan masih berasal dari kerabat maka bisa diandalkan untuk menutupi bukti kesalahan para pendahulunya. Pendekatan kedua yaitu memandang keluarga sebagai sumber daya jaringan. Seperti yang telah disinggung di atas, keluarga politik yang anggotanya menduduki pos-pos kunci pemerintahan di suatu daerah tertentu dapat tertanam dalam struktur klan yang lebih luas, yang dapat digunakan sebagai jaringan mobilisasi politik, baik pada masa kampanye pemilu maupun pada momen-momen tertentu. Dalam hal ini, struktur keluarga dan klan merupakan salah satu dari beberapa jaringan potensial yang dapat diandalkan oleh politisi untuk memobilisasi dukungan ketika sewaktu-waktu dibutuhkan. Pendekatan ketiga dan terkait memandang keluarga sebagai sumber identitas. Dimungkinkan untuk memperlakukan keluarga atau klan sebagai kategori identitas sama seperti yang lain (etnis, wilayah, agama, dll.) Dengan adanya identitas politik keluarga yang dipandang sebagai warisan dinilai dapat menguntungkan secara politik. Begitupun, keanggotaan keluarga itu sendiri dapat dilihat sebagai alat pemberi sinyal, misalnya sebagai tanda bahwa individu yang bersangkutan merupakan bagian dari kelompok tersebut.

Dibawah Kuasa Eddy Rumpoko

Kota Batu selain selain terkenal sebagai kota wisata juga terkenal karena politik dinasti yang terjadi di daerah tersebut. Di Kota Batu, peran keluarga memainkan peranan

penting dalam kondisi perpolitikan yang terjadi di Kota Batu. Dimana seorang Eddy Rumpoko memandang jaringan kekerabatan menjadi sumber daya politik inti untuk mempertahankan dan melebarkan kuasanya. Mereka menunjukkan bahwasanya kerabat dekat adalah pendukung politik mereka yang paling dapat diandalkan. Kita bisa melihat hal ini pada daerah-daerah Indonesia seperti Kabupaten Probolinggo kandidat politik biasanya memperoleh suara tertinggi mereka di desa asal dan daerah sekitarnya di mana terdapat ikatan keluarga dari calon politik yang paling kuat. Kemenangan Dewanti Rumpoko melawan Rudi –Sujono, Hairuddin-Hendra Angga Sonatha dan Abdul Majid-Kasmuri. Semakin menegaskan kuasa dinasti dari keluarga Eddy Rumpoko di Kota Batu.

Pemberiaan kekuasaan kepada daerah telah melahirkan orang kuat lokal melalui praktik dinasti politik di daerah. Hal ini disadari oleh Eddy Rumpoko dengan memanfaatkan keluarganya mengisi ruang perpolitikan lokal dengan menata keluarganya untuk memperkuat basis sosial, ekonomi, maupun politik demi mempertahankan kekuasaannya. Praktik dinasti politik semacam ini cenderung memunculkan sentimen dan reaksi negatif dari publik karena menyangkut etika dan moral seorang penguasa yang hidup di negara demokrasi. politik dinasti adalah hal negatif dari pemberlakuan otonomi daerah yang mengarah pada pembajakan demokrasi. Melalui penyebaran hubungan inti antargenerasi berdasarkan hubungan kekeluargaan atau hubungan ekstragenerasi dengan keuntungan kekuatan keluarga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kerabat Eddy Rumpoko naik kelas menjadi elite pemerintah daerah dan mendapat banyak akses. Sebagai pejabat Eddy Rumpoko tidak hanya berprofesi sebagai elit politik tetapi juga berprofesi sebagai pengusaha dan menggunakan kekuasaannya untuk mempertahankan kekayaannya. Eddy Rumpoko menggunakan dinasti politik sebagai strategi mempertahankan kekayaannya. Dengan kuasa yang melekat pada dirinya digunakan dalam menguasai atau mengelola sumber kekayaan. Hubungan istimewa antara Eddy Rumpoko dan pengusaha Kota Batu Paul Sastro adalah sebuah kesaksian. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara pemerintah dengan pengusaha. Dengan kekayaannya yang dimiliki, Paul Sastro mampu ikut campur ke dalam perpolitikan Kota Batu, hal ini terlihat ketika Paul Sastro merupakan satu-satunya pengusaha dengan kekayaan yang tidak ada tandingannya yang turut membiayai para calon dalam berkompetisi untuk mengamankan bisnisnya.

Potret politik dinasti Eddy Rumpoko menunjukkan akar tradisi feodalisme dan monarki di Indonesia yang tidak banyak berubah. Saat ini, politik dinasti tengah marak di berbagai daerah di Indonesia. Praktik seperti itu harus segera dihentikan, tidak hanya Berlawanan dengan semangat demokrasi yang sebenarnya, praktik politik dinasti dapat

menutup peluang masyarakat untuk menjadi pemimpin. Meskipun politik dinasti tidak melanggar aturan demokrasi, namun dinasti politik praktis membatasi mobilisasi sosial karena kekuasaan hanya terikat pada kelompok masyarakat tertentu. Keterlibatan keluarga dalam politik menunjukkan adanya ketergantungan berlebihan pada ikatan kekeluargaan, yang menimbulkan kebiasaan menempatkan ikatan kekeluargaan dan kekerabatan pada jabatan publik. Dinasti adalah bentuk kartel kekuatan lokal dan kekuatan lokal yang secara individual menciptakan hubungan patrimonial dalam masyarakat dan negara. Kartelisasi merupakan istilah yang diambil dari ilmu ekonomi yang memiliki arti sebuah kegiatan kerjasama dari beberapa perusahaan untuk menetapkan harga, menguasai produksi maupun penjualan, serta kegiatan monopoli lainnya. Hal ini kemudian mengalami transmisi istilah dari konsep ekonomi ke konsep politik. Yang dimaksud kartelisasi politik merupakan kegiatan persekongkolan suatu kelompok untuk mengurangi persaingan yang ada dengan tujuan merebut kekuasaan maupun sumberdaya pada negara dan meraup keuntungan untuk pribadi maupun kelompok. Apa yang mengidentifikasi mereka sebagai kartel hanyalah tindakan mereka yang secara bersama-sama untuk mendominasi dan mereka sepakat untuk tidak bersaing satu sama lain. Alasan dari adanya sebuah kartel biasanya meminimalisir adanya resiko. Hal ini menunjukkan, dengan menciptakan politik dinasti Eddy Rumpoko telah berhasil membentuk kartel politiknya, sehingga meski tidak berkuasa lagi dia mampu untuk mengontrol dan mengendalikan kondisi sosial politik yang ada di Kota Batu. Dengan keberhasilan istrinya sebagai penerus menjadi bukti dimana kuasa ekonomi dan kuasa politik yang dimiliki telah berhasil mempertahankan dan melebarkan kuasanya.

SIMPULAN

Politik Dinasti telah mengancam kemapanan praktik demokrasi lokal yang sedang berjalan di Kota Batu. Proses kandidasi pencalonan menunjukkan mengalami kemacetan dan terpusat pada individu/kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan buruknya jalur penjaringan untuk jadi pemimpin di Indonesia. Proses kandidasi yang tidak transparan dan terbatas untuk orang-orang tertentu yang memiliki pertalian darah dengan elite. Berpotensi terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan konflik kepentingan. Politik dinasti merupakan pelibatan keluarga untuk mendapatkan jabatan politik di pemerintahan. Suatu tindakan dapat dikatakan politik dinasti apabila suatu keluarga mampu memperluas dan mempertahankan kekuasaannya ketika pendiri dinasti telah berakhir masa jabatannya. Seorang politisi secara natural akan berupaya untuk memperkokoh orang-orang terdekat mereka dalam mempertahankan kekuasaan politiknya melalui celah yang bisa

dimanfaatkan, terutama dalam sistem politik yang mendukung iklim tersebut. Politisi akan berusaha membesarkan keluarga mereka jika diberi kesempatan, mengandalkan jaringan keluarga dan membangun dinasti menjadi strategi politik yang efektif. Selain untuk mempertahankan dan memperluas kuasanya, Eddy Rumpoko membangun dinasti untuk perlindungan bagi dirinya sendiri dan 'orang terdekat mereka dari ancaman hukuman. Jika pemegang kekuasaan masih berasal dari kerabat maka bisa diandalkan untuk menutupi bukti kesalahan para pendahulunya. Eddy Rumpoko meyakini bahwasanya kerabat dekat adalah pendukung politik mereka yang paling dapat diandalkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al, Mhd, Fahjri Sukri, and Jurnal Ilmu. "Dinasti Politik Di Banten : Familisme , Strategi Politik Dan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat." *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10, no. 02 (2020).
- Aspinal, Edward, and Muhammad Uhaib. "Memahami Politik Keluarga : Keberhasilan Dan Kegagalan Dinasti Politik Di Daerah Indonesia." *South East Asia Research*, 2016, 1–16. <https://doi.org/10.1177/0967828X16659571>.
- Baumeister, Roy F, and Mark R Leary. "Writing Narrative Literature Reviews." *Review of General Psychology* 1, no. 3 (1997): 311–20.
- Chiquita, Maria. "Struktur Oligarki Di Kota Batu (Relasi Pengusaha Dan Pemerintah Di Kota Batu) Skripsi," 2018.
- Cnn Indonesia. "Dinasti Politik Di Pilkada 2020 Disebut Meningkatkan, 67 Menang." Cnn Indonesia. Accessed April 26, 2023. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201216200833-32-583132/dinasti-politik-di-pilkada-2020-disebut-meningkat-67-menang>.
- Effend, Winda Roselina. "Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Lokal Studi Kasus Dinasti Kota Banten." *Trias Politika* 2, no. 2 (2018): 233–47.
- Ekawati, Esty, and Mouliza K Donna Sweinstani. "Dampak Personalisasi Partai Terhadap Demokrasi Internal Partai Di Indonesia Pasca Orde Baru." *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 5, no. 2 (2020): 111. <https://doi.org/10.24198/jwp.v5i2.28850>.
- ERNESTO DAL BÓ, PEDRO DAL BÓ, JASON SNYDER. "Dinasti Politik." *Review Of Economic Studies*, 2009, 115–42.
- Gunanto, Djoni. "Tinjauan Kritis Politik Dinasti Di Indonesia." *Administrasi Negara* 8 (2020): 177–91.
- Hidayati, Nur. "Dinasti Politik Dan Demokrasi Indonesia" 10, no. 1 (2014): 18–21.

- Katz, R S, and P Mair. *Democracy and the Cartelization of Political Parties* Katz, R. S., & Mair, P. (2018). *Democracy and the Cartelization of Political Parties*. OUP Oxford. <https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=gdZjDwAAQBAJ>. Comparative Politics. United Kingdom: OUP Oxford, 2018. <https://books.google.co.id/books?id=gdZjDwAAQBAJ>.
- Koho, Intan Rachmina. "Oligarki Dalam Demokrasi Indonesia." *Lensa* 4, no. 50 (2021): 60–74.
- Lestari, Yeni Sri. "Kartel Politik Dan Korupsi Politik Di Indonesia." *Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* 12, no. 1 (2017): 67–75. <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v12i1.7820>.
- Liberati, Alessandro, Douglas G Altman, Jennifer Tetzlaff, Cynthia Mulrow, Peter C Gøtzsche, John P A Ioannidis, Mike Clarke, Philip J Devereaux, Jos Kleijnen, and David Moher. "The PRISMA Statement for Reporting Systematic Reviews and Meta-Analyses of Studies That Evaluate Health Care Interventions: Explanation and Elaboration." *Journal of Clinical Epidemiology* 62, no. 10 (2009): e1–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2009.06.006>.
- Mair, Richard S. Katz And Peter. *Democracy and the Cartelization*. United Kingdom: Oxford University Press, 2018.
- Mietzner, Marcus. "Indonesia's 2009 Elections: Populism, Dynasties and the Consolidation of the Party System." Lowy Institute for International Policy, 2009.
- Moher, David, Alessandro Liberati, Jennifer Tetzlaff, Douglas G Altman, and PRISMA Group*. "Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement." *Annals of Internal Medicine* 151, no. 4 (2009): 264–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.7326/0003-4819-151-4-200908180-00135>.
- Samuel, Bob. "Ketika Oligarki Menyandera Partai Politik: Studi Kasus Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya (Golkar) Tahun 2016." *Journal of Politic and Government Studies* 8, no. 04 (2019): 331–40.
- Snyder, Hannah. "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines." *Journal of Business Research* 104, no. March (2019): 333–39. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.
- Susanti, Martien Herna. "Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia." *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 2 (2017): 111–19.
- Tranfield, David, David Denyer, and Palminder Smart. "Towards a Methodology for Developing Evidence - informed Management Knowledge by Means of Systematic Review." *British Journal of Management* 14, no. 3 (2003): 207–22.